

PERAN INA DIGITAL DALAM MENJAWAB TANTANGAN INTEGRASI E GOVERNMENT

Abdurouf Qosdul Bed^{1*}, Amar Aprilliansyah², Anang Sugeng Cahyono³

Universitas Tulungagung^{1,2,3}

¹roufquosdulbed30@gmail.com, ²amarapp113@gmail.com, ³akusukambahdi@gmail.com

Received: 21-12-2024

Revised: 22-02-2025

Approved: 10-03-2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan dan implementasi INA Digital dalam transformasi e-government di Indonesia menggunakan kerangka Layne & Lee. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi aktual dari sistem INA Digital berdasarkan sumber data sekunder seperti artikel dan jurnal terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa INA Digital telah mencapai tahap integrasi vertikal dengan mulai menghubungkan berbagai layanan pemerintah, seperti administrasi kependudukan, kesehatan, dan pendidikan, ke dalam satu platform. Saat ini, INA Digital juga sedang bergerak menuju tahap integrasi horizontal dengan menyatukan layanan lintas sektor untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih holistik. Namun, terdapat beberapa hambatan yang masih perlu diatasi, seperti fragmentasi sistem, koordinasi antarlembaga, serta keterbatasan infrastruktur digital di beberapa wilayah. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa INA Digital merupakan langkah strategis dalam modernisasi layanan publik di Indonesia. Untuk memastikan keberhasilannya, diperlukan peningkatan koordinasi lintas instansi, penguatan infrastruktur digital, serta jaminan keamanan data dan privasi masyarakat. Implementasi bertahap dengan evaluasi berkelanjutan menjadi kunci dalam mengoptimalkan manfaat INA Digital bagi masyarakat dan pemerintahan.

Kata Kunci: INA Digital, E-Government, Layne & Lee, Transformasi Digital, Layanan Publik

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi informasi, yang didukung oleh infrastruktur seperti internet, telah merambah berbagai aspek kehidupan (Widya Novita Sari & Hwihanus Hwihanus, 2023). Teknologi ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk meningkatkan layanan publik, mempermudah akses informasi, dan mengelola kegiatan pemerintahan secara lebih efisien serta transparan (Supriyanto, 2016). Oleh karena itu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, pemerintah dituntut untuk beradaptasi dan menerapkan teknologi informasi dalam pelayanan publik (Nurkholis et al., 2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2012, Pasal 1, menggambarkan bahwa penyelenggaraan sistem elektronik meliputi orang perseorangan, badan pemerintah, badan usaha, atau masyarakat yang menyediakan, mengelola, atau mengoperasikan sistem elektronik, baik secara mandiri maupun bersama-sama, untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau pihak lain (Tasyah et al., 2021).

Pemerintah telah memulai pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas layanan publik (Amrozi et al., 2022). Sebagaimana dinyatakan oleh Akbar dan Sensuse (2018), Electronic Government (e-gov) mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh pemerintah untuk meningkatkan prosedur komunikasi dan transaksi dengan publik, sektor korporasi, dan antar entitas pemerintah. Penerapan e-government bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan, sehingga meningkatkan pemberian layanan publik (Cahyono et al., 2022). Menurut Layne & Lee, (2001) pengembangan e-government terjadi dalam empat fase yang berbeda. Pada

tahap pertama, e-government hanya berfungsi sebagai katalog informasi yang menyediakan data bagi publik. Pada tahap kedua, e-government berkembang menjadi sistem yang lebih interaktif, yang memfasilitasi kontak dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Pada tahap ketiga, integrasi antar organisasi semakin rumit, terutama dalam hal integrasi vertikal. Ini berarti, meskipun organisasi memiliki struktur yang hierarkis, organisasi dengan fungsi serupa akan saling bekerja sama dan bergabung dalam memberikan layanan yang lebih terkoordinasi. Pada tahap keempat, yang merupakan tahap yang lebih berkembang, sistem menjadi semakin rumit. Integrasi antar organisasi yang memiliki fungsi berbeda mulai terjadi, sehingga mereka dapat bekerja sama untuk memberikan layanan yang lebih terkoordinasi dan efektif (Rahman, 2008).

Konsep e-government yang berfokus pada efektivitas, efisiensi, dan transparansi ini semakin dikuatkan dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional. Hal ini mempertegas keyakinan bahwa teknologi informasi dapat menjadi solusi atas berbagai masalah yang terjadi antara pemerintah sebagai penyedia layanan dan masyarakat sebagai pengguna (Rachmatullah & Purwani, 2022). Pengembangan sistem e-government tidak hanya membantu penyebaran informasi, tetapi juga memperkuat eksistensi pemerintah (Windiasih, 2019). Dengan adanya sistem ini, pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif, sekaligus memperkuat keberadaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Pengelolaan teknologi digital yang baik sangat berpengaruh dalam membangun kenyamanan publik, yang merupakan hal penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan suatu negara. Keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, tetapi juga pada kemampuan untuk mengelola dan menyampaikan informasi yang jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Nur Pratiwi et al., 2023). Dengan informasi yang transparan, masyarakat akan lebih percaya dan mendukung upaya pembangunan yang dilakukan oleh negara. Perkembangan teknologi digital yang pesat telah membawa perubahan besar dalam sistem E Government di Indonesia. Hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat terhubung dengan teknologi, mulai dari komunikasi, pendidikan, hingga layanan publik.

Seiring berjalannya waktu, inisiatif untuk memajukan e-government di Indonesia menemui kendala baru. Salah satu kendala yang cukup signifikan adalah banyaknya layanan publik digital yang tersebar di berbagai portal dan aplikasi. Berdasarkan catatan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), sekitar 27.400 aplikasi telah dibuat untuk memudahkan berbagai fungsi pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Angka tersebut tentu saja sangat besar dan bisa jadi melebihi 50.000 aplikasi (Amrynudin, 2024). Layanan tersebut seringkali tidak terstandarisasi dan terfragmentasi, sehingga menyulitkan kolaborasi dan integrasi (Issa, 2019). Kondisi ini menghambat pengelolaan administrasi dan layanan publik yang efektif dan efisien. Untuk mengatasi fragmentasi dan meningkatkan efisiensi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional. Kedua aturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan integrasi jaringan pemerintahan dan memperkuat layanan publik elektronik agar lebih efisien dan terkoordinasi (Gilang Akbar Prambadi, 2024). Diperlukan langkah-langkah tambahan untuk mempercepat proses integrasi. Oleh karena itu, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi

Digital dan Integrasi Layanan Digital Nasional telah diundangkan (Kemenpan, 2024). Pemerintah menunjuk PERURI sebagai GovTech Indonesia dengan nama INA DIGITAL untuk melaksanakan integrasi layanan digital. INA DIGITAL yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo pada 27 Mei 2024 berperan sebagai koordinator ekosistem layanan digital pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, INA DIGITAL bertugas mengelola dan mengintegrasikan sejumlah aplikasi pemerintah pusat dan daerah yang sebelumnya terisolasi (Humas, 2024)

Program ini mengintegrasikan banyak fungsi yang sebelumnya terpisah di berbagai aplikasi, termasuk verifikasi profil ASN, pemantauan sasaran kinerja, dan pembelajaran mandiri. Sebelumnya, fungsi-fungsi ini didistribusikan di banyak program, termasuk yang terkait dengan BKN dan LAN. Koneksi ini akan meningkatkan efisiensi dan kegunaan sistem pemerintahan. INA DIGITAL adalah penemuan pemerintah yang dirancang untuk menggabungkan beberapa platform dan aplikasi menjadi satu entitas, sehingga meningkatkan aksesibilitas bagi publik. INA DIGITAL diharapkan dapat berfungsi sebagai model awal tata kelola yang berpusat pada layanan publik. INA Digital adalah inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk memajukan e-government guna mendorong tata kelola yang efektif. Meskipun demikian, proses transformasi e-government rumit dan penuh dengan kendala, karena memerlukan restrukturisasi dan desain ulang banyak prosedur pemerintahan, baik yang bersifat khusus sektor maupun lintas sektor. Sebelum penerapan INA Digital, pemerintah harus melakukan investigasi komprehensif untuk memastikan kesiapan dan kemanjurannya. Analisis komprehensif terhadap rintangan dan kesulitan saat ini diperlukan untuk mengurangi masalah dalam penerapan INA Digital (Amrynudin, 2024).”

Ditahap awal INA DIGITAL di prioritaskan dalam portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan, sektor aplikasi SPBE Prioritas tersebut di antaranya merupakan (1.) Layanan kependudukan (2) layanan aparatur negara; (3) layanan bantuan sosial; (4) layanan kepolisian; (5) layanan kesehatan; (6) layanan Pendidikan; (7) portal pelayanan publik; (8) Satu Data Indonesia; dan (9) transaksi keuangan negara.(Muhammad Nursyamsi, 2024). Sembilan sektor prioritas dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk dipercepat integrasinya berdasarkan kesiapan dari segi perencanaan, ketersediaan infrastruktur, serta tingkat penggunaan sektor-sektor tersebut dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan berbagai fenomena diatas praktik penyelenggaraan pelayanan berbasis e-government di Indonesia berbasis INA DIGITAL perlu dikaji lebih jauh dalam artikel ini.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan strategi penelitian deskriptif. Menurut Purba et al., (2021) Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan menggambarkan kondisi atau situasi tertentu yang sedang terjadi saat ini. Dalam penelitian ini, peneliti fokus untuk memahami dan menjelaskan fakta-fakta yang ada tentang subjek yang diteliti, seperti kelompok orang, objek, kejadian, atau kondisi tertentu. Penelitian deskriptif tidak bertujuan untuk menguji hubungan sebab-akibat, melainkan untuk memberikan gambaran yang akurat dan jelas tentang status atau keadaan yang ada pada saat penelitian dilakukan. Dengan kata lain, penelitian ini menggambarkan apa yang terjadi tanpa merubah atau mempengaruhi keadaan tersebut.. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai fenomena yang sedang diteliti. Sumber

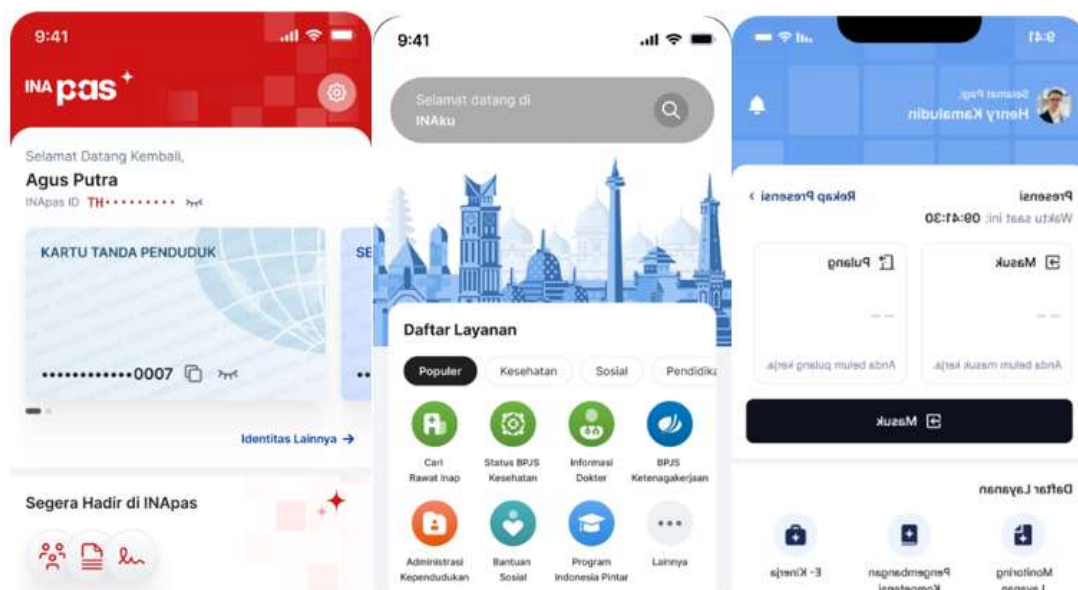
data di peroleh dari artikel atau jurnal terkait sesuai dengan topik yang disajikan berdasarkan pada empirical problem yang terjadi . maka penelitian berfokus pada bagaimana pengembangan dari aplikasi INA DIGITAL itu sendiri.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Model E-Government Layne & Lee dalam Konteks INA Digital

Model Layne & Lee membagi evolusi e-government ke dalam empat tahap utama, yakni katalog (cataloguing), interaksi (interaction), integrasi vertikal (vertical integration), dan integrasi horizontal (horizontal integration). Model ini memberikan kerangka untuk menilai perkembangan sistem e-government di suatu negara, termasuk Indonesia, dalam menghadapi tantangan integrasi layanan digital.

- 1) Tahap Katalog (Cataloguing)
- 2) Pada tahap awal ini, pemerintah hanya menyediakan data dan informasi secara digital kepada publik. Informasi tersebut bersifat statis, seperti pengumuman atau jadwal layanan. Sebelum hadirnya INA Digital, sebagian besar instansi pemerintah di Indonesia berada pada tahap ini. Misalnya, setiap kementerian dan lembaga memiliki portal informasi sendiri-sendiri, seperti situs resmi untuk layanan administrasi kependudukan (dukcapil.go.id) atau kesehatan (kemkes.go.id). Namun, portal-portal tersebut tidak saling terhubung, sehingga masyarakat harus mengakses banyak platform untuk mendapatkan informasi yang berbeda.



Gambar 1. Layanan-layanan INA DIGITAL yang tersedia
sumber(<https://inadigital.co.id/>)

- 2) Tahap transaksi (transaction)
Tahap ini mulai melibatkan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat melalui portal atau aplikasi. Dalam konteks Indonesia, contoh layanan interaktif sebelum integrasi INA Digital adalah aplikasi terpisah untuk mengurus dokumen kependudukan (BKN), pendaftaran bantuan sosial (Kemensos), dan pendidikan (Kemendikbud). Namun, karena layanan ini dikembangkan secara independen oleh masing-masing instansi, masyarakat

sering kali harus menginput data secara berulang di aplikasi yang berbeda. Hal ini tidak hanya mempersulit masyarakat, tetapi juga meningkatkan biaya administrasi pemerintah untuk memelihara berbagai aplikasi yang terfragmentasi.

3) Tahap Integrasi Vertikal (Vertical Integration)

Tahap integrasi vertikal adalah upaya menghubungkan layanan pemerintah dari tingkat lokal, regional, hingga nasional yang memiliki fungsi serupa. INA Digital mulai menjawab tantangan ini dengan mengintegrasikan layanan lintas sektor yang relevan, seperti administrasi kependudukan, kesehatan, dan pendidikan. Langkah ini dilakukan dengan menggabungkan data dari instansi pemerintah pusat dan daerah ke dalam satu platform. Contohnya adalah penggunaan teknologi single sign-on yang memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan tanpa harus membuat akun baru di setiap portal.

4) Tahap Integrasi Horizontal (Horizontal Integration)

Tahap ini merupakan puncak dari evolusi e-government, di mana layanan lintas fungsi dari berbagai sektor digabungkan untuk menciptakan sistem yang lebih holistik. INA Digital sedang bergerak menuju tahap ini dengan mengintegrasikan sembilan sektor prioritas yang meliputi kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, keuangan negara, hingga kepolisian. Dalam integrasi horizontal ini, tantangan utama adalah mengelola interoperabilitas data antara sektor yang memiliki fungsi berbeda. Misalnya, data kependudukan dari Dukcapil harus dapat diakses secara real-time oleh sektor kesehatan untuk mempermudah verifikasi identitas pasien.

Hambatan hambatan INA DIGITAL, Meskipun INA Digital telah membuat langkah besar dalam integrasi layanan, masih terdapat hambatan yang perlu diatasi:

- 1) Fragmentasi Sistem: Dengan lebih dari 27.000 aplikasi pemerintah yang terpisah, proses integrasi membutuhkan waktu dan sumber daya besar.
- 2) Koordinasi Antarlembaga: Kurangnya standar interoperabilitas sering kali menyebabkan keterlambatan dalam implementasi.
- 3) Ketersediaan Infrastruktur: Tidak semua daerah memiliki infrastruktur digital yang memadai, seperti akses internet yang stabil, untuk mendukung layanan terpadu.

INA Digital, yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 27 Mei 2024, merupakan inisiatif pemerintah Indonesia untuk mengintegrasikan berbagai layanan digital yang sebelumnya terfragmentasi. Pada tahap awal, INA Digital berfokus pada sembilan sektor prioritas, termasuk layanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan keuangan negara. Pada 30 September 2024, pemerintah memulai rilis terbatas tiga produk utama INA Digital: INApas, INAku, dan INAgov. INApas adalah layanan identitas digital terpadu, INAku merupakan portal pelayanan publik, dan INAgov adalah portal administrasi pemerintahan untuk Aparatur Sipil Negara (menpanrb, 2024). Rilis terbatas ini melibatkan 50.000 pengguna, terdiri dari 10.000 pegawai negeri untuk INAgov dan 40.000 masyarakat umum untuk INAku, dengan tujuan mendapatkan umpan balik untuk pengembangan lebih lanjut (Mochamad Azhar, 2024). Implementasi INA Digital diharapkan dapat mengatasi fragmentasi ribuan aplikasi layanan publik yang terpisah-pisah, meningkatkan efisiensi, dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintah. Namun, tantangan seperti koordinasi antarlembaga, infrastruktur digital yang belum merata, dan keamanan data perlu terus diperhatikan untuk memastikan keberhasilan program ini.

KESIMPULAN

Menggunakan kerangka Layne & Lee, implementasi INA Digital menunjukkan kemajuan signifikan di tahap integrasi vertikal dan mulai memasuki tahap integrasi horizontal. Langkah ini menjadi tonggak penting bagi transformasi E Government di Indonesia. Namun, untuk mencapai keberhasilan penuh, pemerintah harus terus meningkatkan koordinasi lintas instansi, memperkuat infrastruktur digital, dan memastikan bahwa layanan yang disediakan benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat. INA Digital bukan hanya solusi teknologi, tetapi juga strategi yang bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih modern, efisien, dan inklusif. Untuk memastikan keberhasilan INA Digital, diperlukan langkah-langkah strategis seperti meningkatkan koordinasi antarinstansi pemerintah dan menetapkan standar sistem yang memungkinkan integrasi data dengan mudah. Infrastruktur digital, terutama di wilayah terpencil, perlu diperkuat untuk mendukung akses layanan terpadu. Selain itu, keamanan data harus menjadi prioritas utama untuk melindungi privasi masyarakat. Sosialisasi kepada publik sangat penting agar masyarakat memahami cara menggunakan platform ini. Implementasi INA Digital sebaiknya dilakukan secara bertahap, dimulai dari sektor-sektor prioritas, dengan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan efektivitasnya. Kolaborasi dengan sektor swasta dan akademisi juga dapat mempercepat inovasi teknologi dan mendukung kesuksesan platform ini. Dengan pendekatan yang terukur, INA Digital berpotensi menciptakan layanan publik yang lebih efisien dan responsif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrozi, Y., Aini, N., & Munadhiroh, Z. (2022). Peta Perkembangan E-Government di Indonesia. *JSI: Jurnal Sistem Informasi (E-Journal)*, 14(1), 2465–2472. <https://doi.org/10.18495/jsi.v14i1.16635>
- Amrynudin, A. D. K. (2024). Optimalisasi Pelayanan Publik Melalui Ina Digital Dan Tantangannya. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info_Singkat-XVI-11-I-P3DI-Juni-2024-2014.pdf
- Cahyono, A. S., Zauhar, S., & Domai, T. (2022). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government Pada Pengadilan Agama Kelas I A Tulungagung E-Government-Based Public Service Innovation in Class I A Tulungagung Religious Court. *Publiciana*, 15(02), 82–97. <https://doi.org/10.36563/p%0Ahttps://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/view/644%0Ahttps://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/download/644/477>
- Gilang Akbar Prambadi. (2024). Akselerasi SPBE: Pembentukan INA DIGITAL Serta Percepatan Integrasi Layanan Publik Digital. *REPUBLIKA*.
- Humas. (2024). Menteri PANRB: Ina Digital Akan Luncurkan 3 Layanan Terbatas pada Bulan Ini. *Setkab*.
- Issa, J. (2019). No Title *EΛENH. Aγαη*, 8(5), 55.
- Irma, N., Ginting, B., Agusmidah, & Leviza, J. (2023). Penerapan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Binjai. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(6), 454–466. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i6.168>
- Kemenpan. (2024). Akselerasi SPBE: Pembentukan Ina Digital dan Upaya Cepat Integrasi Layanan Publik Digital. *Menpan*.
- Layne, K., & Lee, J. (2001). Developing fully functional E-government: A four stage model. *Government Information Quarterly*. [https://doi.org/10.1016/S0740-624X\(01\)00066-1](https://doi.org/10.1016/S0740-624X(01)00066-1)
- menpanrb. (2024). Wujudkan Indonesia Terintegrasi, Tiga Produk Inovasi INA DIGITAL

- Mulai Dirilis Secara Terbatas. Menpan.Go.Id.
- Muhammad Nursyamsi. (2024). *Hadirkan GovTech, Misi RI Percepat Integrasi Beragam Layanan*. REPUBLIKA.
- Nur Pratiwi, O., Nahrudin, Z., Nur Aina, A., & Arifin, I. (2023). *Responsivitas Pemerintah Melalui Elektronik Government (E-Gov) Di Kota Makassar*. *Jurnal Administrasi Negara*, 29(1), 61–81. <https://doi.org/10.33509/jan.v29i1.2255>
- Nurkholis, A., Susanto, E. R., & Wijaya, S. (2021). *Penerapan Extreme Programming dalam Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Publik*. *J-SAKTI (Jurnal Sains ...)*, 1–13.
- Purba, R., Mawati, A., Ardiana, D., Pramusita, S., Bermuli, J., Purba, S., Sinaga, K., Mardiana, N., Rofiki, I., & Recard, M. (2021). *Media dan Teknologi Pembelajaran*.
- Rachmatullah, N., & Purwani, F. (2022). *Analisis Pentingnya Digitalisasi & Infrastruktur Teknologi Informasi Dalam Institusi Pemerintahan : E-Government*. *Jurnal Fasilkom*, 12(1), 14–19. <https://doi.org/10.37859/jf.v12i1.3512>
- Rahman, A. (2008). *Arief Rahman Abstract Abstrak*. *Ja Ai*, 15 no 2(2), 190–203. <https://journal.uui.ac.id/JAAI/article/view/3751>
- Supriyanto, E. E. (2016). *Kebijakan Inovasi Teknologi Informasi (IT) Melalui Program Elektronik Government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 1(1), 141. <https://doi.org/10.24905/jip.v1i1.438>
- Tasyah, A., Lestari, P. A., Syofira, A., Rahmayani, C. A., Cahyani, R. D., & Tresiana, N. (2021). *Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital (E-Government) di Era Pandemi Covid-19*. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 18(2), 212–224. <https://doi.org/10.31113/jia.v18i2.808>
- Widya Novita Sari, & Hwihanus Hwihanus. (2023). *Menerapkan Pentingnya Sistem Informasi Akuntansi (Sia) Dalam Transaksi Jual Beli Di Bidang E-Business*. *Jurnal Kajian Dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 1(1), 39–53. <https://doi.org/10.59031/jkpim.v1i1.48>
- Windiasih, R. (2019). *Komunikasi Pembangunan Di Era Digital Melalui E-Government Dalam Pelayanan Publik Dan Pemberdayaan (Development Communication In The Digital Era Through E-Government In Public Services And Empowerment)*. *Journal of Extension and Developmen*, 1(1), 14–21.